



Analisis Valuasi Kekayaan Bersih dalam Praktik Internasional dan Prospek Pengenaan Pajak Kekayaan: Tinjauan Literatur Sistematis dan Implikasinya terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Arief Hidayat Adam*, Radhi Abdul Halim

Universitas Widyatama, Indonesia

Email: Arief.adam@widyatama.ac.id*, radhi.abdul@widyatama.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis praktik internasional dalam pembentukan dan valuasi kekayaan bersih (net wealth) sebagai basis pajak kekayaan serta implikasinya terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur sistematis yang mengikuti alur PRISMA 2020. Penelusuran pada basis data Scopus untuk periode 2016–2026 menghasilkan 768 publikasi awal. Setelah penghapusan duplikasi, penyaringan berdasarkan periode, kualitas sumber, ketersediaan abstrak, relevansi judul dan abstrak, serta keteraksesan teks lengkap, sebanyak 173 studi dimasukkan ke dalam sintesis akhir. Data dianalisis secara deskriptif, tematik, dan komparatif dengan fokus pada klasifikasi aset dan kewajiban, metode valuasi, pengungkapan, verifikasi, respons perilaku, serta hubungan antara nilai akuntansi dan nilai fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan bersih untuk tujuan perpajakan merupakan konstruksi fiskal yang tidak identik dengan ekuitas menurut laporan keuangan. Praktik internasional menerapkan hierarki valuasi yang disesuaikan dengan karakteristik aset: harga pasar terobservasi untuk aset likuid; nilai pasar, penilaian individual, atau nilai administratif untuk properti; nilai aset bersih yang disesuaikan, pendekatan pendapatan, dan transaksi pembandingan untuk saham perusahaan tertutup; serta model khusus untuk aset tidak berwujud, aset digital, dan kepemilikan lintas yurisdiksi. Keandalan nilai ditentukan oleh kualitas data, konsistensi tanggal pengukuran, pelaporan pihak ketiga, identifikasi pemilik manfaat, pembaruan nilai, dan mekanisme koreksi. Pemetaan terhadap SAK menunjukkan bahwa SAK dapat berfungsi sebagai kerangka referensial dan sumber informasi awal, tetapi belum dapat menjadi dasar tunggal penghitungan kekayaan bersih orang pribadi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman valuasi fiskal, rekonsiliasi antara nilai akuntansi dan nilai fiskal, serta penguatan infrastruktur pelaporan dan verifikasi aset.

Kata kunci: pajak kekayaan; kekayaan bersih; valuasi aset; tinjauan literatur sistematis; Standar Akuntansi Keuangan; akuntansi perpajakan; nilai wajar.

ABSTRACT

This study examines international practices in the construction and valuation of net wealth as the tax base for wealth taxation and their implications for the Indonesian Financial Accounting Standards (Standar Akuntansi Keuangan/SAK). The research employs a qualitative approach through a systematic literature review following the PRISMA 2020 guidelines. A search of the Scopus database covering the period 2016–2026 initially identified 768 publications. After removing duplicates and applying screening criteria based on publication period, source quality, abstract availability, title and abstract relevance, and full-text accessibility, 173 studies were included in the final synthesis. The data were analyzed using descriptive, thematic, and comparative approaches, focusing on the classification of assets and liabilities,

valuation methods, disclosure and verification practices, behavioral responses, and the relationship between accounting values and fiscal values. The findings indicate that net wealth for taxation purposes is a fiscal construct that is conceptually distinct from equity reported in financial statements. International practices adopt valuation hierarchies tailored to the characteristics of different asset classes: observable market prices for liquid assets; market value, individual appraisal, or administrative value for real property; adjusted net asset value, income-based approaches, and comparable transaction methods for shares in privately held companies; and specialized valuation models for intangible assets, digital assets, and cross-border ownership. The reliability of asset values depends on data quality, consistency of the valuation date, third-party reporting, beneficial ownership identification, periodic value updates, and effective correction mechanisms. The mapping of these practices to the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) suggests that SAK can serve as a reference framework and an initial source of information but cannot function as the sole basis for determining individual net wealth for taxation purposes. Accordingly, the implementation of a wealth tax requires comprehensive fiscal valuation guidelines, reconciliation mechanisms between accounting and fiscal values, and strengthened asset reporting and verification infrastructure.

Keywords: *wealth tax; net wealth; asset valuation; systematic literature review; Indonesian Financial Accounting Standards (SAK); tax accounting; fair value.*

Pendahuluan

Latar Belakang dan Signifikansi Penelitian

Pajak kekayaan kembali menjadi perhatian dalam perdebatan fiskal global karena konsentrasi kekayaan meningkat lebih cepat daripada kemampuan sebagian sistem pajak untuk menjangkau akumulasi aset. Piketty (2014) serta Saez dan Zucman (2016) memperlihatkan bahwa ketimpangan kekayaan tidak hanya bersumber dari perbedaan pendapatan tahunan, tetapi juga dari akumulasi modal, pewarisan, dan kenaikan nilai aset. Dalam konteks tersebut, pajak kekayaan dipandang sebagai salah satu instrumen yang dapat memperluas ukuran kemampuan membayar di luar penghasilan berjalan.

Literatur selanjutnya memperlihatkan bahwa isu pajak kekayaan tidak dapat dipisahkan dari respons perilaku, administrasi, dan kualitas basis data. Seim (2017) menunjukkan adanya respons wajib pajak terhadap pajak kekayaan di Swedia, sedangkan Advani dan Tarrant (2021) menegaskan bahwa elastisitas kekayaan kena pajak dipengaruhi oleh desain kebijakan, peluang penghindaran, dan kapasitas penegakan. Burgherr (2021) menambahkan bahwa biaya administrasi sangat bergantung pada cakupan aset, metode penilaian, dan ketersediaan informasi pihak ketiga.

Persoalan utama yang sering kurang mendapat perhatian adalah valuasi kekayaan bersih. Pajak kekayaan tidak cukup dirumuskan melalui penetapan subjek, tarif, atau ambang batas. Kebijakan tersebut memerlukan aturan mengenai aset yang termasuk dalam basis pajak, kewajiban yang dapat dikurangkan, tanggal pengukuran, atribut nilai, metode penilaian, dan bukti yang harus disediakan wajib pajak. Daly et al. (2021) menunjukkan bahwa harga pasar terbuka dapat menjadi acuan umum, tetapi penerapannya berbeda untuk saham tercatat, properti, perusahaan tertutup, hak pensiun, aset tidak berwujud, dan aset unik.

Bagi Indonesia, persoalan valuasi juga beririsan dengan SAK. Informasi mengenai saham perusahaan tertutup, properti investasi, aset tetap, instrumen keuangan, aset tidak berwujud, dan kewajiban dapat bersumber dari laporan keuangan entitas. Namun, nilai akuntansi dibentuk untuk tujuan pelaporan keuangan dan tidak selalu identik dengan nilai fiskal atau

nilai ekonomis kekayaan orang pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan SAK sebagai kerangka referensial yang perlu diuji relevansi dan keterbatasannya, bukan sebagai dasar pajak yang dapat diterapkan secara otomatis.

Perkembangan Literatur, Kesenjangan, dan Kebaruan Penelitian

Penelitian pajak kekayaan berkembang dari pembahasan normatif mengenai keadilan dan redistribusi menuju analisis empiris mengenai perilaku wajib pajak, mobilitas, investasi, konsentrasi kekayaan, dan administrasi. Kaymak dan Poschke (2016), Seim (2017), Scheuer dan Slemrod (2020), serta Guvenen et al. (2023) menunjukkan semakin beragamnya pendekatan teoritis dan kuantitatif dalam mengkaji pajak atas kekayaan. Perkembangan data administratif, survei kekayaan, pertukaran informasi otomatis, dan pelaporan pihak ketiga juga membuka ruang penelitian mengenai pengukuran kekayaan yang sebelumnya tidak teramati (Blanchet et al., 2022; Gerritsen, 2024; Londoño-Vélez & Tortarolo, 2025).

Meskipun literatur telah berkembang, sebagian besar kajian masih berfokus pada tarif optimal, dampak distribusional, penerimaan, atau respons perilaku. Kajian yang mengintegrasikan klasifikasi aset, metode valuasi, perlakuan kewajiban, pengungkapan, verifikasi, dan relevansinya terhadap standar akuntansi masih terbatas. Selain itu, hasil penelitian negara maju tidak dapat langsung ditransfer ke negara berkembang karena perbedaan registri aset, kedalaman pasar, kualitas laporan keuangan, kapasitas penilai, dan administrasi perpajakan.

Kesenjangan tersebut menimbulkan kebutuhan akan sintesis yang menempatkan valuasi sebagai inti pembentukan basis pajak. Penelitian ini tidak bertujuan menentukan tarif atau desain operasional pajak kekayaan untuk Indonesia. Kontribusinya adalah mengidentifikasi pola praktik internasional dan menilai sejauh mana SAK Indonesia dapat menyediakan informasi yang relevan bagi pengukuran, pengungkapan, dan verifikasi kekayaan orang pribadi.

Tujuan dan Pertanyaan Penelitian

Kebaruan penelitian terletak pada integrasi tiga lapisan analisis yang selama ini lebih sering dibahas secara terpisah. Pertama, penelitian mensintesis klasifikasi aset dan kewajiban pembentuk kekayaan bersih. Kedua, penelitian menyusun hierarki metode valuasi berdasarkan karakteristik aset dan kualitas bukti nilai. Ketiga, temuan tersebut dipetakan terhadap SAK Indonesia untuk mengidentifikasi dukungan informasi, keterbatasan, serta kebutuhan rekonsiliasi fiskal. Integrasi tersebut membedakan penelitian ini dari tinjauan yang hanya berfokus pada dampak pajak kekayaan terhadap ketimpangan, penerimaan, atau respons perilaku wajib pajak.

Penelitian bertujuan: (1) menganalisis cara praktik internasional mengklasifikasikan aset dan kewajiban sebagai pembentuk kekayaan bersih; (2) mengidentifikasi metode valuasi yang digunakan untuk berbagai jenis aset; dan (3) menilai implikasi temuan internasional terhadap SAK Indonesia sebagai kerangka referensial. Berdasarkan tujuan tersebut, pertanyaan penelitian adalah: bagaimana praktik internasional membentuk basis kekayaan bersih; metode valuasi apa yang digunakan; dan sejauh mana SAK Indonesia dapat mendukung kebutuhan informasi valuasi kekayaan bersih orang pribadi?

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Kekayaan dan Konsep Kekayaan Bersih

Pajak kekayaan merupakan pajak yang dikenakan atas stok aset atau kekayaan pada suatu tanggal tertentu. Dalam bentuk pajak kekayaan bersih tahunan, basis pajak umumnya dibentuk dari nilai aset yang termasuk dalam cakupan pajak setelah dikurangi kewajiban

yang diperkenankan. Konsep ini berbeda dari pajak penghasilan yang dikenakan atas arus pendapatan dan berbeda pula dari pajak warisan yang timbul pada saat pengalihan kekayaan.

Kekayaan bersih untuk tujuan pajak merupakan konstruksi hukum dan fiskal. Tidak seluruh aset harus dimasukkan, tidak seluruh kewajiban dapat dikurangkan, dan beberapa aset dapat memperoleh pengecualian atau diskon. Chamberlain (2021) menekankan pentingnya penentuan subjek, kepemilikan manfaat, trust, dan struktur kepemilikan tidak langsung. Perret (2021) menunjukkan bahwa pengecualian yang luas dapat mempersempit basis, meningkatkan peluang perencanaan pajak, dan mengurangi penerimaan.

Dari perspektif kemampuan membayar, kekayaan dapat mencerminkan kapasitas ekonomi yang tidak sepenuhnya terlihat dari penghasilan tahunan. Namun, keadilan vertikal dan horizontal baru dapat diwujudkan apabila aset yang secara ekonomi sebanding dinilai dengan dasar yang konsisten. Dengan demikian, definisi kekayaan bersih dan atribut nilai merupakan komponen substantif dari keadilan pajak.

Pengukuran dan Valuasi Aset

Valuasi merupakan proses penentuan nilai moneter suatu aset atau kewajiban pada tanggal pengukuran. Atribut pengukuran dapat berupa biaya historis, biaya kini, nilai realisasi, nilai kini, nilai pasar, atau nilai wajar. Pemilihan atribut memengaruhi relevansi, keterbandingan, verifikasiabilitas, biaya kepatuhan, dan potensi sengketa.

Harga pasar terobservasi memberikan bukti nilai yang relatif kuat untuk aset yang diperdagangkan secara aktif. Ketika harga langsung tidak tersedia, nilai dapat diestimasi melalui pendekatan pasar, pendapatan, atau biaya. Bjersund dan Schjelderup (2021) menunjukkan bahwa perlakuan nilai yang berbeda antarjenis aset dapat memengaruhi pilihan portofolio. Daly et al. (2021) menegaskan bahwa pendekatan valuasi harus disesuaikan dengan karakteristik aset dan bahwa aset perusahaan tertutup, pensiun, barang koleksi, serta aset luar negeri menghadirkan kesulitan lebih besar.

Pada perusahaan tertutup, nilai buku ekuitas dapat digunakan sebagai titik awal, tetapi tidak selalu menangkap goodwill internal, prospek usaha, aset tidak berwujud, hak kontrol, dan diskon likuiditas. Pendekatan pendapatan dapat mengatasi sebagian keterbatasan tersebut, tetapi sensitif terhadap proyeksi arus kas dan tingkat diskonto. Karena itu, penilaian perusahaan tertutup sering memerlukan pendekatan gabungan dan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan.

Relevansi Standar Akuntansi Keuangan sebagai Kerangka Referensial

SAK menyediakan konsep pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset serta liabilitas. PSAK 113 menyediakan definisi nilai wajar, teknik penilaian, hierarki input, dan pengungkapan ketidakpastian. Standar instrumen keuangan mendukung pengukuran aset keuangan, sedangkan standar properti investasi, aset tetap, aset takberwujud, agrikultur, serta provisi dan liabilitas menyediakan informasi bagi kelompok aset tertentu.

Meskipun demikian, tujuan SAK adalah menghasilkan laporan keuangan bertujuan umum bagi entitas, sedangkan pajak kekayaan menentukan kewajiban hukum orang pribadi. Banyak aset pribadi tidak dicatat dalam laporan keuangan entitas. Selain itu, basis pengukuran campuran dalam SAK menyebabkan nilai tercatat tidak selalu merepresentasikan nilai pasar. Oleh sebab itu, hubungan SAK dan valuasi kekayaan bersih perlu dipahami melalui pemetaan fungsi informasi, bukan melalui penyamaan nilai akuntansi dengan nilai fiskal.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur sistematis. Prosedur seleksi dilaporkan dengan mengacu pada PRISMA 2020 untuk meningkatkan transparansi dan keterlacakan. SLR digunakan untuk membangun korpus penelitian, sedangkan analisis deskriptif, tematik, dan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi tren, pola, persamaan, perbedaan, dan kesenjangan.

Unit analisis adalah artikel ilmiah yang membahas pajak kekayaan, kekayaan bersih, basis pajak, valuasi aset, ketimpangan kekayaan, administrasi, kepatuhan, penghindaran, serta hubungan dengan pengukuran akuntansi. Fokus substantif diberikan pada artikel yang menyediakan informasi mengenai objek aset, kewajiban, metode penilaian, data pelaporan, dan verifikasi.

Strategi Penelusuran, Kriteria, dan Seleksi Literatur

Penelusuran dilakukan pada basis data Scopus untuk periode 2016–2026. Kata kunci meliputi kombinasi *wealth tax*, *net wealth valuation*, *net wealth*, *wealth tax valuation*, *tax accounting*, *financial accounting standards*, *asset valuation*, *tax base*, *wealth tax base*, *tax the rich*, *annual wealth tax*, dan *one-time wealth tax*. Scopus dipilih sebagai basis utama karena menyediakan metadata terstruktur dan mekanisme indeksasi jurnal.

Pencarian awal menghasilkan 768 record. Sebelum penyaringan, 77 record duplikat dihapus, 258 record dikeluarkan karena tidak sesuai dengan periode publikasi, 42 record tidak memenuhi kriteria kualitas sumber, dan 16 record tidak memiliki abstrak. Sebanyak 375 record kemudian disaring berdasarkan judul dan abstrak; 142 record dikeluarkan karena tidak relevan. Dari 233 laporan yang dicari, 60 tidak dapat diperoleh. Dengan demikian, 173 studi dinilai layak dan dimasukkan dalam tinjauan akhir.

Tabel 1. Ringkasan proses seleksi literatur

Tahap	Keterangan	Jumlah
Identifikasi	Record ditemukan melalui Scopus	768
Penghapusan sebelum penyaringan	Duplikasi	77
Penghapusan sebelum penyaringan	Di luar periode 2016–2026	258
Penghapusan sebelum penyaringan	Tidak memenuhi kriteria kualitas sumber	42
Penghapusan sebelum penyaringan	Tidak memiliki abstrak	16
Penyaringan	Record yang disaring	375
Penyaringan	Record dikeluarkan karena tidak relevan	142
Pengambilan teks lengkap	Laporan yang dicari	233
Pengambilan teks lengkap	Laporan tidak diperoleh	60
Inklusi	Studi yang dimasukkan dalam tinjauan	173

Sumber: diolah peneliti berdasarkan hasil penyaringan PRISMA.

Ekstraksi, Klasifikasi, dan Analisis Data

Data diekstraksi ke dalam matriks yang mencakup penulis, tahun, jurnal, yurisdiksi, tujuan, metode, teori, jenis aset, basis pajak, metode valuasi, perlakuan kewajiban, mekanisme pelaporan dan verifikasi, hasil, keterbatasan, serta implikasi. Analisis deskriptif digunakan untuk memetakan tren tahun, lokasi penelitian, kata kunci, metode, dan teori.

Analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema: konsep kekayaan bersih, objek pajak, metode valuasi, kewajiban, pengecualian, administrasi, risiko implementasi, dan implikasi akuntansi. Analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi variasi praktik antarnegara. Tahap akhir dilakukan melalui matriks pemetaan yang membandingkan kebutuhan valuasi kekayaan bersih dengan SAK Indonesia berdasarkan cakupan objek, dasar pengukuran, kedekatan dengan nilai pasar, pengungkapan, verifikasi, kesesuaian bagi orang pribadi, dan kebutuhan rekonsiliasi fiskal.

Keandalan dan Transparansi Proses Analisis

Keandalan proses analisis dijaga melalui penggunaan kriteria inklusi dan eksklusi yang terdokumentasi, matriks ekstraksi dengan kategori yang konsisten, serta pencatatan alasan pengeluaran publikasi pada setiap tahap penyaringan. Temuan tidak ditarik dari frekuensi kata semata, tetapi dibangun melalui pembacaan tujuan, metode, konteks yurisdiksi, objek pajak, jenis aset, metode valuasi, dan hasil setiap studi. Jejak analisis tersebut memungkinkan hubungan antara data literatur, tema, dan kesimpulan ditelusuri kembali.

Untuk mengurangi interpretasi yang terlalu umum, sintesis dibatasi pada bukti yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Artikel yang terutama membahas ketimpangan atau kebijakan fiskal digunakan sebagai konteks, sedangkan kesimpulan mengenai metode valuasi dan implikasi akuntansi didasarkan pada studi yang secara eksplisit membahas basis pajak, pengukuran aset, pelaporan, atau verifikasi. Pendekatan ini memperkuat transparansi antara korpus literatur dan argumentasi yang disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Literatur dan Perkembangan Kajian

Hasil penelusuran menunjukkan peningkatan perhatian akademik terhadap pajak kekayaan dan kekayaan bersih selama periode kajian. Kata kunci *wealth tax*, *inequality*, dan *taxation* mendominasi korpus, diikuti tema redistribusi, distribusi kekayaan, penghindaran pajak, dan administrasi. Pola tersebut menunjukkan bahwa penelitian pajak kekayaan berkembang pada persimpangan ekonomi publik, akuntansi, hukum pajak, sosiologi fiskal, dan kebijakan.

Secara geografis, literatur lebih banyak berasal dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, khususnya Norwegia, Jerman, Swiss, Spanyol, Swedia, dan Inggris. Konsentrasi tersebut berkaitan dengan ketersediaan data administratif, pengalaman historis dengan pajak kekayaan, dan intensitas perdebatan kebijakan. Negara berkembang mulai muncul melalui penelitian mengenai Argentina, Kolombia, Afrika Selatan, dan Indonesia, tetapi jumlah dan kedalaman data masih lebih terbatas.

Pendekatan kuantitatif mendominasi melalui data administratif, survei rumah tangga, model keseimbangan umum, mikrosimulasi, dan eksperimen. Studi kualitatif menelaah politik pajak, diskursus, persepsi publik, dan kendala kelembagaan. Dominasi metode kuantitatif memperkuat bukti mengenai respons dan distribusi, tetapi tidak selalu memberikan rincian aturan valuasi per jenis aset. Karena itu, sintesis lintas metode diperlukan untuk menghubungkan hasil ekonomi dengan mekanisme pengukuran.

Peta Tema dan Orientasi Penelitian

Tabel 2. Tema utama dalam sintesis literatur

Tema	Fokus analisis
Kekayaan bersih	Definisi fiskal, cakupan aset, kewajiban, pengecualian, dan kepemilikan manfaat
Valuasi aset	Harga pasar, nilai wajar, nilai administratif, nilai buku, penilaian individual, pendekatan pendapatan dan biaya
Administrasi dan kepatuhan	Pelaporan pihak ketiga, registri aset, pengisian otomatis, pemeriksaan, dan biaya administrasi
Respons perilaku	Penghindaran, penggelapan, relokasi, restrukturisasi aset, dan penggunaan utang
Keadilan dan distribusi	Kemampuan membayar, keadilan vertikal dan horizontal, konsentrasi kekayaan, serta redistribusi
Akuntansi dan pelaporan	Keterkaitan nilai akuntansi, nilai ekonomis, nilai fiskal, pengungkapan, dan verifikasi

Sumber: sintesis peneliti.

Teori perpajakan optimal digunakan untuk menganalisis trade-off antara penerimaan, redistribusi, investasi, dan respons wajib pajak (Scheuer & Slemrod, 2020; Guvenen et al., 2023). Teori kemampuan membayar mendasari argumentasi bahwa stok kekayaan merupakan indikator kapasitas ekonomi. Sementara itu, teori pengukuran akuntansi membantu menjelaskan mengapa pilihan atribut nilai menghasilkan konsekuensi yang berbeda bagi relevansi, keterbandingan, dan verifikasiabilitas.

Temuan lintas tema menunjukkan bahwa desain pajak kekayaan tidak dapat dipisahkan dari sistem informasi. Ketika data aset keuangan dilaporkan pihak ketiga, tingkat verifikasi lebih tinggi. Sebaliknya, saham perusahaan tertutup, aset tidak berwujud, aset luar negeri, dan aset unik menghadirkan asimetri informasi serta ruang penilaian yang lebih besar.

Klasifikasi Aset dan Kewajiban Pembentuk Kekayaan Bersih

Hasil sintesis menunjukkan bahwa kekayaan bersih kena pajak tidak dibentuk dengan menjumlahkan seluruh aset dan mengurangi seluruh kewajiban secara otomatis. Pembentukan basis dimulai dari identifikasi pemilik manfaat, klasifikasi aset yang termasuk, penetapan pengecualian, dan pengujian kewajiban. Hak ekonomi dapat dimiliki secara langsung atau melalui perusahaan, trust, partnership, rekening luar negeri, dan struktur lain.

Aset yang umum dipertimbangkan meliputi kas dan deposito, saham dan obligasi, reksa dana, properti, saham perusahaan tertutup, kepemilikan usaha, aset pensiun dan asuransi tertentu, aset tidak berwujud, karya seni dan koleksi, kendaraan bernilai tinggi, aset digital, serta aset luar negeri. Perbedaan antarnegara terutama terletak pada cakupan pengecualian, diskon, threshold, dan perlakuan terhadap aset produktif atau rumah tinggal utama.

Kewajiban hanya dapat dikurangkan apabila memiliki dasar hukum, menjadi tanggungan wajib pajak pada tanggal penilaian, didukung dokumen, dan tidak dibentuk secara artifisial. Utang pihak berelasi, provisi, liabilitas kontinjensi, dan kewajiban yang tidak terkait dengan aset kena pajak memerlukan pengujian lebih ketat. Temuan ini menegaskan bahwa kekayaan bersih fiskal berbeda dari ekuitas akuntansi.

Pada kepemilikan usaha, aset perusahaan tidak secara otomatis menjadi aset pribadi pemegang saham. Objek pada tingkat orang pribadi adalah nilai saham atau hak ekonomisnya. Laporan keuangan perusahaan digunakan sebagai sumber data untuk menilai kepemilikan tersebut, sehingga dibutuhkan pemisahan antara entitas dan pemilik sekaligus rekonsiliasi terhadap nilai ekonomis saham.

Hierarki dan Pemilihan Metode Valuasi

Tabel 3. Hierarki metode valuasi kekayaan bersih

Metode	Objek yang sesuai	Kelebihan	Keterbatasan
Harga pasar terobservasi	Saham tercatat, obligasi, aset digital yang likuid	Objektif, mutakhir, dan mudah diverifikasi	Volatilitas, waktu penutupan, pasar acuan, dan kurs
Nilai pasar terbuka atau transaksi pembandingan	Properti dan aset dengan pasar pembandingan	Merepresentasikan transaksi wajar	Membutuhkan data pembandingan dan penyesuaian
Nilai wajar berbasis model	Instrumen kompleks dan aset entitas	Menyediakan kerangka asumsi dan hierarki input	Sensitif terhadap model serta input tidak terobservasi
Nilai administratif	Properti massal dan aset yang memiliki registri	Biaya administrasi lebih rendah dan konsisten	Berisiko tertinggal dari pasar dan menciptakan ketidaksetaraan
Nilai aset bersih yang disesuaikan	Saham perusahaan tertutup dan usaha	Menggunakan laporan keuangan yang tersedia	Dapat mengabaikan goodwill dan aset internal
Pendekatan pendapatan	Usaha, properti sewa, dan hak ekonomi	Menangkap kapasitas menghasilkan arus kas	Bergantung pada proyeksi, diskonto, dan normalisasi laba
Pendekatan biaya	Aset khusus dan aset pengganti	Dapat diterapkan ketika pasar tidak tersedia	Tidak selalu menangkap utilitas dan prospek ekonomi
Penilaian individual atau formula standar	Aset unik atau aset sulit dinilai	Menangkap karakteristik khusus atau menekan biaya administrasi	Subjektivitas atau presisi lebih rendah

Sumber: sintesis peneliti berdasarkan Daly et al. (2021), Bjerksund dan Schjelderup (2021), serta literatur dalam korpus SLR.

Harga pasar terobservasi merupakan rujukan pertama karena menghasilkan nilai yang dapat direproduksi. Namun, aturan harus menetapkan tanggal, pasar, mata uang, dan perlakuan terhadap fluktuasi. Untuk properti, model penilaian massal dapat menekan biaya, tetapi harus dikalibrasi terhadap transaksi aktual dan menyediakan mekanisme koreksi (Bø et al., 2025).

Valuasi saham perusahaan tertutup memerlukan perhatian khusus. Nilai aset bersih memberikan dasar yang dapat diaudit, tetapi berisiko tidak menangkap goodwill internal, prospek usaha, dan aset tidak berwujud. Pendekatan pendapatan menangkap kapasitas menghasilkan arus kas, tetapi meningkatkan ketergantungan pada asumsi. Kombinasi

metode, pengungkapan asumsi, dan hak banding menjadi penting untuk mengurangi sengketa.

Aset luar negeri dan kepemilikan tidak langsung menimbulkan masalah ganda, yaitu identifikasi pemilik dan penentuan nilai aset dasar. Alstadsæter et al. (2018) serta Londoño-Vélez dan Tortarolo (2025) menunjukkan besarnya kekayaan yang dapat berada di luar pengamatan administrasi. Karena itu, pertukaran informasi dan registri pemilik manfaat merupakan bagian dari sistem valuasi, bukan hanya instrumen penegakan.

Pelaporan, Verifikasi, dan Risiko Implementasi

Keandalan valuasi sangat bergantung pada sistem pelaporan. Saez dan Seim (2025) menunjukkan pentingnya kewajiban pelaporan dan informasi yang telah diisi sebelumnya dalam penegakan pajak kekayaan. Data bank, kustodian, registri properti, laporan perusahaan, dan pertukaran informasi dapat menurunkan ketergantungan pada deklarasi sepihak wajib pajak.

Risiko utama meliputi *underreporting*, *undervaluation*, restrukturisasi portofolio, relokasi, penggunaan utang, dan pemindahan aset ke kategori yang dikecualikan. Mas-Montserrat et al. (2025) dan Jakurti dan Süßmuth (2023) menunjukkan bahwa respons dapat muncul melalui perubahan basis kena pajak tanpa selalu mencerminkan perubahan kekayaan ekonomi. Oleh karena itu, analisis respons harus membedakan perubahan riil, perubahan pelaporan, dan perubahan bentuk kepemilikan.

Biaya administrasi tidak hanya berasal dari appraisal, tetapi juga dari pengumpulan data, koreksi, pemeriksaan, keberatan, dan litigasi. Burgherr (2021) menegaskan bahwa biaya dapat ditekan apabila aset mudah dinilai, data tersedia, dan metode distandardisasi. Sebaliknya, pengecualian yang kompleks serta penilaian individual tahunan untuk aset tidak likuid dapat meningkatkan beban administrasi dan kepatuhan.

Implikasi terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Tabel 4. Pemetaan kebutuhan valuasi kekayaan bersih terhadap SAK Indonesia

Komponen	Kebutuhan valuasi	SAK yang relevan	Dukungan	Keterbatasan
Instrumen keuangan	Harga pasar atau nilai wajar pada tanggal pengukuran	PSAK 109, PSAK 107, PSAK 113	Klasifikasi, nilai wajar, dan pengungkapan risiko	Tanggal fiskal dan pemilik manfaat tetap perlu ditetapkan
Properti	Nilai pasar, penilaian individual, atau nilai administratif	PSAK 240, PSAK 216, PSAK 113	Informasi biaya, revaluasi, atau nilai wajar untuk aset entitas	Properti pribadi berada di luar pelaporan entitas
Saham perusahaan tertutup	Nilai aset bersih disesuaikan, pendapatan, atau pembandingan	SAK Entitas Privat, PSAK 113, PSAK 238	Data aset, liabilitas, laba, arus kas, dan aset tidak berwujud yang diakui	Nilai buku tidak identik dengan nilai ekonomis saham
Aset tidak berwujud	Pendekatan pendapatan, pasar, atau biaya	PSAK 238 dan PSAK 113	Pengakuan dan pengukuran aset yang memenuhi kriteria	Aset internal dan goodwill internal sering tidak diakui
Kewajiban	Utang yang sah, terkait, dan dapat diverifikasi	PSAK 109 dan PSAK 237	Identifikasi liabilitas dan pengungkapan	Pengakuan akuntansi tidak menentukan pengurangan fiskal

Sumber: pemetaan peneliti.

Pemetaan menunjukkan bahwa SAK relevan sebagai bahasa pengukuran dan infrastruktur informasi. PSAK 113 menyediakan konsep nilai wajar dan hierarki input, tetapi tidak menentukan objek pajak, tanggal fiskal, kewajiban yang dapat dikurangkan, atau threshold. Standar instrumen keuangan relatif kuat untuk aset yang memiliki harga pasar, sedangkan standar properti, aset tetap, dan aset tidak berwujud menyediakan informasi yang harus disesuaikan dengan tujuan fiskal.

SAK Entitas Privat memiliki peran penting bagi saham perusahaan tertutup dan usaha keluarga. Laporan keuangan dapat menjadi dasar rekonsiliasi, tetapi nilai ekuitas tidak langsung merepresentasikan nilai kepemilikan orang pribadi. Perbedaan ini berasal dari biaya historis, aset tidak berwujud yang tidak diakui, transaksi pihak berelasi, goodwill internal, serta prospek usaha.

Karena subjek prospektif adalah orang pribadi, sebagian besar aset tidak berada dalam ruang lingkup laporan keuangan entitas. Data bank, registri, kustodian, penilai, dan deklarasi harta tetap diperlukan. Kesimpulan bahwa SAK hanya memadai secara parsial bukan kritik terhadap kualitas standar, melainkan konsekuensi dari perbedaan tujuan pelaporan keuangan dan perpajakan.

Kontribusi Teoretis dan Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menempatkan valuasi sebagai titik temu antara keadilan pajak, administrasi perpajakan, dan pelaporan keuangan. Prinsip kemampuan membayar hanya dapat dioperasionalkan apabila aset dan kewajiban diklasifikasikan secara konsisten serta diukur dengan dasar nilai yang dapat dibandingkan dan diverifikasi. Dari sisi metodologis, integrasi tinjauan literatur sistematis dan matriks pemetaan memungkinkan temuan lintas yurisdiksi dihubungkan dengan kapasitas SAK Indonesia. Dari sisi praktis, hasil penelitian menyediakan kerangka awal untuk mengidentifikasi data yang dapat berasal dari laporan keuangan, data yang memerlukan rekonsiliasi fiskal, dan data yang harus diperoleh dari registri atau pihak ketiga.

Keterbatasan dan Agenda Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Sumber utama dibatasi pada Scopus sehingga buku, bab buku, working paper, peraturan, petunjuk administrasi, dan putusan pengadilan tidak tercakup secara sistematis. Analisis menggunakan data sekunder dan tidak menguji hasil pemetaan melalui data kekayaan orang pribadi, wawancara, atau simulasi nilai. Selain itu, perbedaan sistem hukum dan administrasi antarnegara membatasi transfer langsung suatu praktik ke Indonesia. Oleh karena itu, temuan penelitian harus dipahami sebagai sintesis konseptual dan komparatif, bukan sebagai rancangan operasional pajak kekayaan.

Agenda penelitian berikutnya perlu menguji matriks pemetaan menggunakan data simulasi atau studi kasus kekayaan orang pribadi. Penelitian dapat membandingkan nilai buku, nilai pasar, nilai wajar, nilai administratif, dan nilai fiskal untuk portofolio yang mencakup properti, saham tercatat, saham perusahaan tertutup, aset digital, dan kewajiban. Wawancara dengan otoritas pajak, penyusun standar, penilai, auditor, dan wajib pajak juga diperlukan untuk menilai biaya, keterlaksanaan, dan kebutuhan bukti.

Penelitian selanjutnya perlu memperluas basis data di luar Scopus dan memasukkan peraturan, petunjuk administrasi, putusan pengadilan, serta dokumen teknis negara. Kajian hukum dan administratif penting karena rincian valuasi sering tidak tersedia dalam artikel jurnal. Selain itu, status kebijakan dan standar akuntansi harus diperbarui pada tanggal publikasi karena berkembang secara dinamis.

SIMPULAN

Praktik internasional menunjukkan bahwa kekayaan bersih untuk tujuan pajak merupakan konstruksi fiskal yang dibentuk melalui klasifikasi aset, identifikasi pemilik manfaat, penetapan pengecualian, dan pengujian kewajiban. Kekayaan bersih fiskal tidak identik dengan ekuitas akuntansi karena cakupan aset dan pengurangan kewajiban ditentukan oleh ketentuan pajak.

Tidak terdapat satu metode valuasi yang sesuai bagi seluruh aset. Hierarki metode dimulai dari harga pasar terobservasi, kemudian transaksi pembandingan, pendekatan pendapatan atau biaya, nilai administratif, nilai aset bersih yang disesuaikan, formula standar, dan penilaian individual. Pilihan metode harus memperhatikan karakteristik aset, kualitas data, biaya, konsistensi, verifiabilitas, pembaruan nilai, dan mekanisme koreksi.

SAK Indonesia dapat menyediakan konsep dan informasi awal bagi sebagian aset dan kewajiban, tetapi belum dapat menjadi dasar tunggal untuk menghitung kekayaan bersih orang pribadi. Diperlukan pedoman valuasi fiskal, rekonsiliasi antara nilai akuntansi dan nilai fiskal, serta integrasi data perbankan, kustodian, properti, kepemilikan korporasi, pemilik manfaat, dan aset luar negeri. Penelitian ini tidak merumuskan tarif, ambang batas, atau desain operasional pajak kekayaan; kontribusinya adalah menyediakan kerangka konseptual bagi kajian lebih lanjut mengenai kesiapan pengukuran dan informasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Advani, A., & Tarrant, H. (2021). Behavioural responses to a wealth tax. *Fiscal Studies*, 42(3–4). <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12283>
- Alm, J. (2024). Do we have the tools for achieving distributive tax justice? *South African Journal of Accounting Research*, 38(3). <https://doi.org/10.1080/10291954.2024.2306717>
- Alstadsæter, A., Johannesen, N., & Zucman, G. (2018). Who owns the wealth in tax havens? Macro evidence and implications for global inequality. *Journal of Public Economics*, 162, 89–100. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2018.01.008>
- Andrew, J., Baker, M., Cooper, C., & Tweedie, J. (2024). Wealth taxes and the post-COVID future of the state. *Critical Perspectives on Accounting*, 98. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2022.102431>
- Bjersund, P., & Schjelderup, G. (2021). Investor asset valuation under a wealth tax and a capital income tax. *International Tax and Public Finance*, 29(4). <https://doi.org/10.1007/s10797-021-09691-0>
- Blanchet, T., Flores, I., & Morgan, M. (2022). The weight of the rich: Improving surveys using tax data. *The Journal of Economic Inequality*, 20(1). <https://doi.org/10.1007/s10888-021-09509-3>
- Bø, E. E., Nygård, O. E., & Thoresen, T. O. (2025). Improving housing valuation for taxation: The Norwegian case. *International Tax and Public Finance*. <https://doi.org/10.1007/s10797-025-09928-2>
- Burgherr, D. (2021). The costs of administering a wealth tax. *Fiscal Studies*, 42(3–4). <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12276>

- Chamberlain, E. (2021). Who should pay a wealth tax? Some design issues. *Fiscal Studies*, 42(3–4). <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12284>
- Daly, S., Hughson, H., & Loutzenhiser, G. (2021). Valuation for the purposes of a wealth tax. *Fiscal Studies*, 42(3–4). <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12287>
- Finér, L., & Ylönen, M. (2017). Tax-driven wealth chains: A multiple case study of tax avoidance in the Finnish mining sector. *Critical Perspectives on Accounting*, 48. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.01.002>
- Gerritsen, A. (2024). Income tax evasion and third-party reported consumption and wealth: Implications for the optimal tax structure. *The Scandinavian Journal of Economics*, 127(1). <https://doi.org/10.1111/sjoe.12574>
- Güvenen, F., Kambourov, G., Kuruscu, B., Ocampo, S., & Chen, D. (2023). Use it or lose it: Efficiency and redistributive effects of wealth taxation. *The Quarterly Journal of Economics*, 138(2). <https://doi.org/10.1093/qje/qjac047>
- Hope, D., & Limberg, J. (2022). The economic consequences of major tax cuts for the rich. *Socio-Economic Review*, 20(2). <https://doi.org/10.1093/ser/mwab061>
- Jakurti, E., & Süssmuth, B. (2023). Behavioral responses to wealth taxes: Evidence from the Spanish Survey of Household Finances. *Economics Letters*, 223. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2023.110976>
- Kapeller, J., Leitch, S., & Wildauer, R. (2023). Can a European wealth tax close the green investment gap? *Ecological Economics*, 209. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2023.107849>
- Kaymak, B., & Poschke, M. (2016). The evolution of wealth inequality over half a century: The role of taxes, transfers and technology. *Journal of Monetary Economics*, 77. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2015.10.004>
- Kuypers, S., Figari, F., & Verbist, G. (2024). Vertical and horizontal equity of wealth taxes: An assessment from a joint income-wealth perspective. *Economics Letters*, 234. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2023.111438>
- Londoño-Vélez, J., & Tortarolo, D. (2025). Revealing 21% of GDP in hidden assets: Evidence from Argentina. *Journal of Public Economics*, 250. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2025.105471>
- Marti, S., Martínez, I. Z., & Scheuer, F. (2023). Does a progressive wealth tax reduce top wealth inequality? Evidence from Switzerland. *Oxford Review of Economic Policy*, 39(3). <https://doi.org/10.1093/oxrep/grad025>
- Mas-Montserrat, M., Durán-Cabré, J. M., & Esteller-Moré, A. (2025). Avoidance responses to the wealth tax. *Journal of Public Economics*, 246. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2025.105351>
- Niemann, R., & Sureth-Sloane, C. (2018). Investment timing effects of wealth taxes under uncertainty and irreversibility. *Journal of Business Economics*, 89(4). <https://doi.org/10.1007/s11573-018-0918-4>
- Perret, S. (2021). Why were most wealth taxes abandoned and is this time different? *Fiscal Studies*, 42(3–4). <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12278>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E.,

- McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.
- Rotberg, S. (2021). The implications of housing for the design of wealth taxes. *International Economic Review*, 63(1). <https://doi.org/10.1111/iere.12532>
- Saez, E., & Seim, D. (2025). Wealth tax enforcement in Sweden: Filing requirements and pre-populated returns. *Journal of Public Economics*, 249. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2025.105440>
- Saez, E., & Zucman, G. (2016). Wealth inequality in the United States since 1913: Evidence from capitalized income tax data. *The Quarterly Journal of Economics*, 131(2), 519–578. <https://doi.org/10.1093/qje/qjw004>
- Saputro, H. (2025). Monitoring the super-rich: The effects of Indonesia’s tax office on high-wealth individuals. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 61(1). <https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2359512>
- Scheuer, F., & Slemrod, J. (2020). Taxation and the superrich. *Annual Review of Economics*, 12(1). <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-081919-115106>
- Seim, D. (2017). Behavioral responses to wealth taxes: Evidence from Sweden. *American Economic Journal: Economic Policy*, 9(4). <https://doi.org/10.1257/pol.20150290>
- Thoresen, T. O., Ring, M. A. K., Nygård, O. E., & Epland, J. (2022). A wealth tax at work. *CESifo Economic Studies*, 68(4). <https://doi.org/10.1093/cesifo/ifac009>
- Wolff, E. N. (2021). Taxes and the revaluation of household wealth. *Journal of Pension Economics and Finance*, 21(4). <https://doi.org/10.1017/S147474722100024X>